

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harus kita sadari bahwa kehidupan bangsa ini saling ketergantungan satu sama lainnya dalam hal menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh. Untuk menyikapi hal tersebut diharapkan keterlibatan dari semua aspek yang bersifat positif serta mendukung terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh yang salah satunya dalam bidang pembangunan. Peranan Aparatur pada masa ini lebih diarahkan untuk menciptakan aparatur yang efisien, efektif bersih, dan beribawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum Aparatur dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan Negara.

Perhatian pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan pedesaan dengan segala aspeknya, karena titik tumpu pembangunan masyarakat Indonesia berada di pedesaan. Tetapi semuanya berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini. Keadaan yang demikian ini diperkuat oleh adanya kenyataan bahwa masyarakat perdesaan masih diliputi dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan berbagai kerawanan sosial lainnya. Perlu usaha yang terencana untuk membangun prasarana perhubungan desa, produksi, pemasaran dan prasarana desa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Aparatur Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempunyai hambatan dan permasalahan. Hambatan dan permasalahan tersebut antara lain meliputi : kurangnya sumberdaya manusia Perangkat Desa, kurangnya sarana dan prasarana kerja, serta penghasilan yang masih rendah.

Kita memahami bahwa pembangunan dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dsb. Namun pemahaman yang demikian tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa adanya kritik maupun kontrol terhadapnya karena pada prinsipnya kehadiran pembangunan dapat diasumsikan sebagai satu-satunya cara untuk dapat

memecahkan masalah dapat berbalik fakta, seperti adanya kesenjangan sosial-ekonomi, politik dan kebudayaan.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan dari Aparatur setempat baik Aparatur pusat, Aparatur daerah, kecamatan maupun Aparatur desa.

Aparatur desa berperan penting dalam mewujudkan pembangunan desa yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Sebagaimana pasal 1 ayat 9 tahun 2013 Undang-Undang tentang Desa menyebutkan bahwa kawasan pedesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa Aparatur, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Hal ini bertujuan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlandaskan pada potensi dan kemampuan masyarakatnya sehingga mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Tetapi tujuan pembangunan tersebut tidak akan terwujud ketika tidak ada kerjasama antara Aparatur desa dengan masyarakat untuk membangun desanya dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan desa akan menjadi sebuah tantangan besar bagi Aparatur desa, dimana terdapat permasalahan yaitu bahwa Desa Sabandar pembangunan desa yang masih minim, dan partisipasi masyarakat yang minim.

Pertama, Desa Sabandar merupakan desa pemekaran (desa baru) dari yang mulai dimekarkan pada tahun 2003. Alasan dilakukan pemekaran sebagaimana diungkapkan oleh selaku tokoh masyarakat yang ikut memperjuangkan pemekaran tersebut adalah “jika masih bersatu ternyata yang termasuk paling barat yang tidak kebagian masalah pembangunan”, beliau merasa miris melihat keadaan masyarakat dan berkeinginan untuk memajukan daerah melalui pemekaran tersebut.

Melihat keadaan tersebut maka dilakukan suatu pemekaran wilayah pedesaan oleh aparat Aparatur berserta masyarakat. Hal ini dilakukan karena adanya

kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara Aparatur dan masyarakat, serta memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan serta bertujuan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas / terukur dan mewujudkan kemandirian daerah. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal Akan lebih tersedia serta meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Aparatur dan pengelolaan pembangunan.

Pemekaran wilayah desa yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam bidang ekonomi, keuangan (rencana add 1 Milyard setiap desa), pelayanan publik dan aparatur Aparatur desa termasuk juga mencakup aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar utama pembangunan pada jangka panjang.

Bagi suatu desa yang baru dimekarkan, memiliki tanggung jawab bagi Aparatur baru dan daerah otonom baru Desa Sabandar dalam menjalankan roda keAparaturnya dengan mandiri dan bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas Aparatur baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur serta bisa mempercepat akselerasi pembangunan daerah yang menyeluruh.

Kedua, dalam pembangunan terdapat permasalahan yaitu terlihat dengan tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, prasarana fisik, dan kelembagaan yang rendah. Masalah dalam pendapatan dikarenakan masyarakat memiliki akses yang lemah terhadap faktor-faktor produktif, modal usaha, keterampilan, dan informasi yang rendah. Masalah di bidang pendidikan adalah sarana prasarana yang kurang memadai, dan kualitas tenaga pengajar. Di bidang kesehatan, masih kurangnya sarana prasarana kesehatan, tenaga medis, sistem pelayanan, dan rendahnya tingkat kesadaran akan pola hidup yang sehat.

Berkenaan dengan sarana fisik yaitu jalan antar desa yang masih memerlukan pembenahan untuk kelancaran akses. Masalah ini timbul karena dalam proses pembuatan jalan tidak ada yang mengawasi dari Aparatur desa dan masyarakat,

sehingga kualitas jalan rendah dan mudah rusak. Selain itu sarana yang lain adalah rendahnya kepemilikan sarana sanitasi keluarga seperti jamban, tidak adanya sistem pengelolaan sampah atau tempat pembuangan, mengindikasikan bahwa minimnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dengan pola hidup yang bersih.

Ketiga, partisipasi masyarakat yang masih minim terlihat dari kurangnya keterlibatan masyarakat dalam tahapan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan hasil, dan tahap evaluasi. Partisipasi menurut Rono dan Abdillahi (2003) merupakan aktif dan terlibatnya masyarakat dalam pelaksanaan program Aparatur yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya di lapangan masih ditemukan permasalahan dalam pembanguan pedesaan yang dilakukan oleh Aparatur desa Mekarhurip. Ini membuktikan bahwa kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Aparatur desa masih belum maksimal, dan dalam pelaksanaan pembangunan belum memenuhi semua kebutuhan untuk mensejahterakan masyarakat mengenai prioritas kebutuhan masyarakat yang utama dalam pembangunan. Hal ini menjadi faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat enggan untuk terlibat atau berperan serta dalam pembangunan, karena mereka kurang dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan sehingga mereka tidak mengetahui tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya, dalam Ketentuan Umum Pada Undang-undang No 78 Tahun 2007 poin (6) menyatakan bahwa:

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Aparatur dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa prakarsa masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjalankan pembangunan sehingga peran serta desa sebagai lembaga Aparatur yang berada paling dekat dengan masyarakat mempunyai peran krusial dalam pembangunan nasional menuju kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan peran sentral tersebut maka desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Aparatur No 72 tahun 2005 tentang Desa diberikan kewenangan dalam

mengelola keuangan dan secara mandiri menjalankan roda Aparaturnya sendiri melalui prinsip-prinsip Aparatur partisipatif.

Melihat Desa Sabandarsebagai desa baru, akan lebih sulit di awal untuk melaksanakan keAparaturnya karena harus dengan mandiri melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan pembangunan dengan otonomi yang dimilikinya. Disini peran Aparatur desa (Aparatur desa dan BPD) sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

Kepemimpinan Aparatur desa sangat berperan dalam mewujudkan pembangunan desa. Aparatur desa memiliki informasi dan komunikasi mengenai hal-hal yang berkaitan kepentingan masyarakat. Pemimpin dalam hal ini merupakan suatu sosok atau figur yang mengetahui segala hal mengenai masyarakat dan menjadi panutan bagi masyarakat karena memiliki kekuasaan, kewibawaan, dan kepandaian yang menjadi perhatian masyarakat. Melalui sosok seorang pemimpin tersebut suatu pembangunan bisa diselenggarakan dengan baik, efektif dan efisien.

Masyarakat juga sangat berperan dalam mewujudkan pembangunan desa. Melalui masyarakat pemimpin mengetahui berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melakukan pembangunan guna untuk mensejahterakan masyarakatnya. Selain itu pembangunan yang berlandaskan pada potensi dan kemampuan masyarakatnya akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan harus dilakukan pembangunan yang partisipatif, dimana masyarakat berperan aktif dan atau ikut serta dalam proses pembangunan.

Melihat berbagai kenyataan dalam pelaksanaan kepemimpinan masyarakat, menarik untuk diteliti dimana perlu adanya suatu kajian atau penelitian mengenai pelaksanaan kepemimpinan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mencari solusi dengan memberikan pengetahuan tentang perlunya kepemimpinan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam satu studi penelitian dan mengambil judul: **“PERAN APARATUR DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA”**.(Studi Deskriptif di Desa Sabandar Kabupaten Cianjur)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas tergambar bahwa yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah mengenai peran kepemimpinan aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan uraian lebih rinci sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kepemimpinan aparatur desa dalam melaksanakan program pembangunan desa, menyangkut kepemimpinan yang diterapkan oleh aparatur desa dengan mengidentifikasi kepemimpinan yang dilaksanakan oleh aparatur desa melalui teori kepemimpinan.
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan kesadaran akan pentingnya program pembangunan desa untuk kesejahteraan bersama dalam memenuhi kebutuhan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat diidentifikasi melalui bentuk partisipasi yang diberikan; tahapan partisipasi yang dilakukan masyarakat mencakup keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, serta evaluasi program pembangunan desa; dan tingkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan oleh aparatur desa mencakup faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa.
4. Upaya yang dilakukan oleh aparatur desa dalam mengatasi hambatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan oleh aparatur desa mencakup solusi dari aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan identifikasi mengenai masalah pokok penelitian yaitu dengan rumusan masalah penelitian “Peran Kepemimpinan Aparatur Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan”. Agar rumusan masalah tersebut menjadi rinci, maka dikembangkan beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemimpinan aparatur desa dalam melaksanakan pembangunan desa?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?
3. Hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan oleh Aparatur desa?
4. Upaya apa yang dilakukan oleh aparatur desa dalam mengatasi hambatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan oleh aparatur desa?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepemimpinan Aparatur desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Sabandar Kecamatan Karang Tengah Kab.Cianjur
2. Tujuan Khusus Adapun yang menjadi tujuan khusus tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mengetahui bagaimana aparatur desa dalam melaksanakan pembangunan desa.
 - b. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
 - c. Mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan oleh aparatur desa.
 - d. Mengetahui berbagai upaya yang dilakukan oleh aparatur desa dalam mengatasi hambatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan oleh aparatur desa.

E. Manfaat Penelitian

Selain tujuan-tujuan tersebut di atas, penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau wawasan keilmuan yang dikhususkan dalam bidang kajian ilmu sosiologi khususnya sosiologi organisasi, sosiologi pembangunan, dan sosiologi desa kota yang dikhususkan dalam peranan kepemimpinan aparatur desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a. Peneliti

- 1) Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam bidang ilmu sosiologi.
- 2) Untuk menambah wawasan luas mengenai kondisi riil di masyarakat terutama mengenai pelaksanaan kepemimpinan aparatur desa kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa.

b. Masyarakat Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan mampu membuka mata masyarakat bahwa partisipasi mereka dalam pembangunan desa sangat penting guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Aparatur Desa

- 1) Membantu aparatur dalam mencari solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memperbaiki kinerja aparatur desa dalam peranannya sebagai pemimpin masyarakat.
- 2) Mengungkapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat yang ada.

d. Prodi Pendidikan Sosiologi

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu mengenai kepemimpinan sebagai contoh mengenai penerapan

kepemimpinan dalam keAparatur terutama untuk kajian mata kuliah sosiologi organisasi.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan dalam meningkatkan pemahaman terhadap mata kuliah sosiologi pembangunan dan sosiologi pedesaan yang berhubungan dengan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat desa.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan contoh dalam menerapkan dan menghubungkan beberapa cabang ilmu sosiologi dalam mendeskripsikan suatu fenomena dan penerapannya di lapangan.

F. Definisi Operasional

Agar konsep-konsep dalam penelitian ini dapat diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus dioperasionalkan dengan mengubahnya menjadi variabel seperti yang di kemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2002: hlm 99) Variable adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variable dalam penelitian ini adalah :

1. Aparatur Desa

Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan aparatur desa adalah pembantu bagi kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, semua unsur yang mempunyai peran penting dan terlibat di dalam lingkungan desa.

2. Pembangunan Desa

Pendapat Marbun (2008:38) bahwa pembangunan desa merupakan usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistematis dan terarah sebagai satu kesatuan dengan pembangunan daerah dan nasional.

3. Partisipasi masyarakat

Menurut Inu Kencana Syafii, Partisipasi masyarakat adalah penentuan sikap dan keterlibatan setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta mengambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Syafii, 2001:142).

G. Sistematika Skripsi

Agar skripsi ini dapat dengan mudah dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan, maka skripsi ini disajikan ke dalam lima bab yang disusun berdasarkan struktur penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Identifikasi masalah penelitian
- C. Rumusan masalah penelitian
- D. Tujuan penelitian
- E. Manfaat penelitian
- F. Struktur organisasi skripsi

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

- A. Kepemimpinan
 - 1. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan
 - 2. Teori Kepemimpinan
- B. Peranan Aparatur Desa
- C. Konsep Partisipasi Masyarakat
 - 1. Pengertian Partisipasi
 - 2. Bentuk Partisipasi
 - 3. Tahapan Partisipasi
 - 4. Tingkat Partisipasi
 - 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat
- D. Desa dan Masyarakat Desa
 - 1. Desa
 - 2. Masyarakat Desa
- E. Konsep 4Pembangunan Desa
 - 1. Pengertian Pembangunan dan Pembangunan Desa
 - 2. Tahap Perencanaan Pembangunan
 - 3. Tahap Pelaksanaan Pembangunan
 - 4. Tahap Pengawasan Pembangunan
- F. Penelitian yang Relevan
- G. Kerangka Pikir

BAB III: METODE PENELITIAN

- A. Desain penelitian
- B. Metode penelitian
- C. Definisi operasional
- D. Instrumen penelitian
- E. Proses pengembangan instrumen
- F. Teknik pengumpulan data
- G. Tahap Penelitian
- H. Analisis data

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menulis menganalisis hasil temuan data mengenai Peran Aparatur Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

BAB V: SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab V berisi mengenai simpulan dan saran yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan penelitian terhadap hasil analisis temuan penelitian.